

EVALUASI PENYUSUNAN DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA

DAERAH : (*Stdi Kasus di Kabupaten Halmahera Selatan*)

Amran Husen¹; Aziz Hasyim²; Rusmin A. Yunus³

1. Department of Economics, Postgraduate Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Khairun, 97719, Ternate, North Maluku Province, Indonesia

2 Department of Development Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Khairun, 97719, Ternate, North Maluku Province, Indonesia

* Corresponding Author:

¹amran.husen@yahoo.co.id, ²azkangeilo.unkhair@gmail.com,

³rusminyusus@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Alokasi Anggaran Belanja 2019-2023 telah memenuhi fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Berganda. Hasil analisis menemukan fungsi alokasi terbukti memiliki hubungan yang positif dengan kinerja APBD di Kabupaten Halmahera Selatan. Sesuai fungsi alokasi bertujuan mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, melalui fungsi alokasi APBD mempertegas peran pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan berjalan dengan baik. Fungsi distribusi terbukti memiliki hubungan positif dengan kinerja APBD di Kabupaten Halmahera Selatan. Artinya melalui fungsi distribusi, mempunyai dimensi pemerataan, baik secara langsung maupun tidak langsung terbukti memberikan manfaat kepada semua pihak. Fungsi Stabilisasi terbukti memiliki hubungan yang positif dengan kinerja APBD di Kabupaten Halmahera Selatan. Stabilisasi dasarnya menyangkut dua hal, yaitu alat pengendali inflasi dan penstabil pertumbuhan ekonomi, dan terbukti berjalan dengan sangat baik.

Kata Kunci : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi APBD

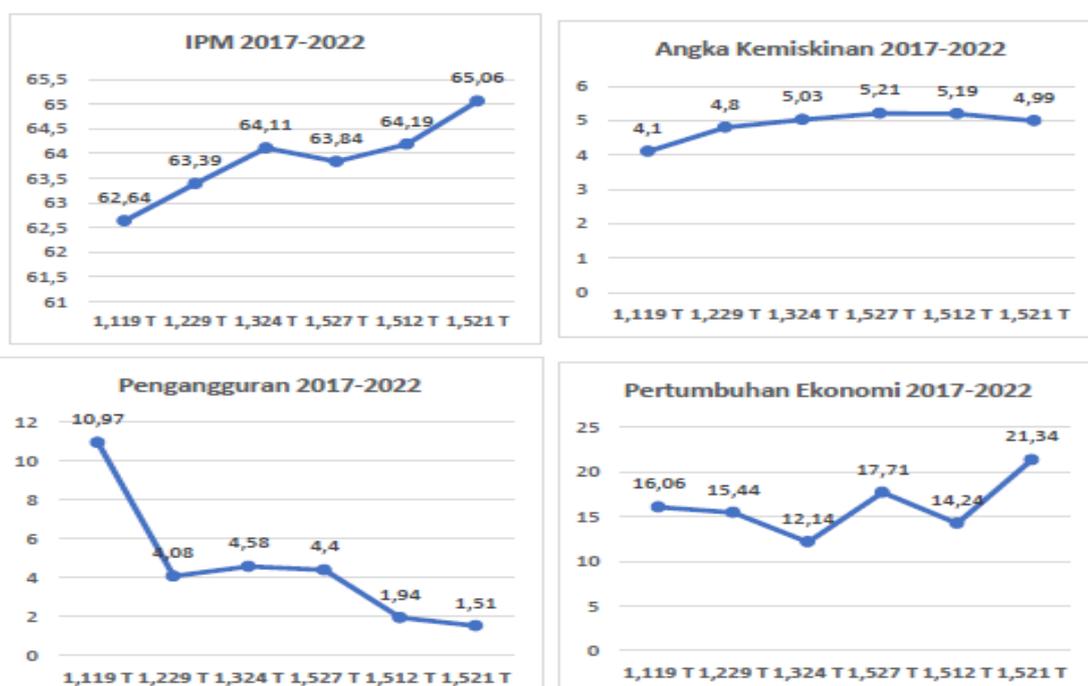
I. Latar Belakang

Organisasi sektor publik berkeinginan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu diperlukan

adanya penganggaran yang baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan memiliki kinerja anggaran yang baik berdasarkan rasio efektivitas, akan tetapi masih terdapat ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya di Kabupaten Halmahera Selatan. Fungsi APBD adalah sebagai dasar dalam penerapan pendapatan dan belanja daerah selama periode berlangsung. APBD berfungsi untuk merencanakan sekaligus menjadi pedoman dalam pengelolaan kegiatan di tahun yang sedang berlangsung. Menurut Halim (2017), ada enam fungsi APBD, yakni: fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Sebagai bagian dari perencanaan yang baik, sistematis dan terarah, penganggaran sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti halnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka dengan mengedepankan pada prinsip perencanaan penganggaran yang efektif dan efisien serta mengacu pada fungsi APBD. Proses perencanaan anggaran (Welhelmina, 2012) (Hendrawan, 2019) (Salbiah dan Ridha Rizky, 2012) dilakukan dengan menggunakan pendekatan *bottom-up* dan pendekatan *topdown* dan pada proses tersebut pihak eksekutif telah melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tokoh-tokoh masyarakat, pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak Perguruan Tinggi saat kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan. Penyusunan anggaran, belum semua anggota yang terkait dalam Tim penyusun APBD terlibat secara aktif, (Mahpudin, 2017), (Chelsea Pangalila, 2017) (Elsera, 2022) peranan DPRD dalam proses penyusunan anggaran dimulai dari hasil draft yang telah

disusun oleh pihak eksekutif bukan sejak pembahasan anggaran, alokasi anggaran belanja pembangunan sebagian besar didasarkan pada aspirasi masyarakat yang tertuang dalam hasil Rakorbang. Sedangkan dari sisi alokasi Anggaran Belanja Daerah dilihat berdasarkan biaya pelayanan.



Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran (**fungsi alokasi**) penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Fungsi distribusi adalah bahwa komponen pengeluaran dalam anggaran mempunyai dimensi pemerataan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pengeluaran untuk membangun infrastruktur ekonomi seperti jalan, bendungan, dan lain-lain, akan memberikan manfaat kepada semua pihak. Atau, pembukaan daerah terisolasi

akan cenderung menguatkan *terms of trade* kelompok masyarakat terpencil. **Fungsi stabilisasi** diatas mengkonfermasi bahwa melalui, APBD sebagai alat stabilisasi perekonomian agar berjalan dalam kapasitasnya. Jika perekonomian dalam keadaan lesu maka peran pemerintah melakukan intervensi dengan menambah pengeluaran, atau sebaliknya jika perekonomian terlalu panas atau pada saat permintaan agregat domestik tumbuh di atas kemampuan sektor penawaran untuk tumbuh, maka peran pemerintah melakukan kebijakan fiskal ketat. Dalam stabilisasi tersebut pada dasarnya dilihat dari dua hal, yaitu alat pengendali inflasi dan penstabil pertumbuhan ekonomi.

Upaya yang dilakuan pasca pemekaran menunjukkan perbaikan dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capain pertumbuhan ekonomi yang positif, angka pengangguran yang terus menurun dan kemiskinan cendrung fluktuatif. Merujuk pada data yang ada maka penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Alokasi Anggaran Belanja 2022-2023 telah memenuhi fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

II. KAJIAN LITERATUS

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana keuangan tahunan bagi suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran merupakan dokumen kebijakan ekonomi pemerintah yang sangat penting dan merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Mardiasmo (2015) menyatakan bahwa anggaran berisi rencana

kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Pengertian anggaran menurut Mulyadi (2015) adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Sedangkan menurut Antono, F.E. & Virdayanti, K.C. (2018). anggaran merupakan suatu rencana yang disajikan secara kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang yang di susun untuk periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Anggaran secara jelas mengekspresikan apa yang akan dilakukan selama satu tahun kedepan dan menyatakan juga otoritas penggunaan sumber daya keuangan yang diperlukan. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu (Bastian 2016). Menurut Hansen (2012) menyatakan bahwa anggaran merupakan komponen utama didalam suatu perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan.

B. Fungsi Alokasi

Melalui fungsi alokasi, maka APBN terutama sisi pengeluaran ditujukan untuk sektor-sektor pembangunan. Misalnya untuk dekade sekarang, masalah pengangguran menjadi sangat penting sehingga menjadi muatan normatif dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini wajar karena dengan dalam jangka pendek dengan kolapnya perekonomian Indonesia sejak krisis pada pertengahan 1997 membuat kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai 7-8

persen. Padahal, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Fungsi alokasi tidak hanya ditujukan untuk masalah pengangguran saja tetapi juga akan disesuaikan dengan tujuan-tujuannya atau “sesuai dengan apa yang seharusnya”. Misalnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur harus mendapatkan prioritas utama. Atau untuk meningkatkan sumberdaya manusia, maka alokasi anggaran untuk pengembangan sumberdaya manusia harus cukup dominan. Dengan demikian fungsi alokasi akan mengarahkan pengeluaran anggaran pemerintah pada orientasi peran yang akan dilakukan oleh pemerintah. Melalui fungsi alokasi ini maka untuk Indonesia, saat ini investasi pendidikan melalui pengembangan SDM menjadi keharusan.

C. Fungsi Distribusi

Fungsi Distribusi Melalui fungsi distribusi, komponen pengeluaran dalam anggaran mempunyai dimensi pemerataan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pengeluaran untuk membangun infrastruktur ekonomi seperti jalan, bendungan, dan lain-lain, akan memberikan manfaat kepada semua pihak. Atau, pembukaan daerah terisolasi akan cenderung menguatkan terms of trade kelompok masyarakat terpencil. Manfaat marjinal tindakan ini yang terbesar biasanya akan dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dibandingkan mereka yang berpenghasilan tinggi, dimana yang terakhir ini sebelumnya telah memiliki akses (meskipun terbatas). Peran distribusi APBN berkaitan juga derhadap usaha untuk memperbaiki kegagalan mekanisme pasar (market failure) dalam mengangkat kelompok masyarakat yang berpendapatan bawah dan memperbaiki distribusi pendapatan. Fungsi ini berjalan

secara paralel dengan aspek penerimaan dimana dengan sistem pajak yang progresif akan memberikan beban pajak yang "fair" sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan dan kemudian disalurkan melalui pengeluaran pemerintah.

Distribusi juga dilakukan untuk pembangunan daerah tertinggal. Saat ini Indonesia menghadapi pembangunan yang tidak merata sehingga masih banyak daerah yang tertinggal. Fungsi distribusi juga akan menunjukkan bahwa APBN merupakan produk kebijakan pemerintah yang bersifat politis. Adanya pengeluaran untuk subsidi adalah salah satu contohnya. Walaupun secara teori subsidi baik BBM maupun non BBM merupakan distorsi di dalam perekonomian, namun pemerintah tetap menganggarkannya di dalam APBN.

D. Fungsi Stabilisasi

Melalui fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat stabilisasi perekonomian agar berjalan dalam kapasitasnya. Jika perekonomian dalam keadaan lesu maka peran pemerintah melakukan intervensi dengan menambah pengeluaran, atau sebaliknya jika perekonomian terlalu panas atau pada saat permintaan agregat domestik tumbuh di atas kemampuan sektor penawaran untuk tumbuh, maka peran pemerintah melakukan kebijakan fiskal ketat. Dalam stabilisasi tersebut pada dasarnya dilihat dari dua hal, yaitu alat pengendali inflasi dan penstabil pertumbuhan ekonomi. Kedua hal ini pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat. APBN juga dapat mengurangi dampak inflasioner dengan melakukan sterilisasi anggaran, yaitu meningkatkan simpanan pemerintah pada Bank Indonesia atau mempercepat pembayaran beban utang luar negeri. Dengan demikian dalam penetapan APBN, mengacu kepada UU No.23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai RAPBN (Pasal 54 Ayat 2.

III. METODOLOGI

A. Analisis Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif variabel digunakan untuk menggambarkan data variabel dependen dan independen yaitu Kinerja APBD, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi berdasarkan angka atau nilai serta prosentase dari nilai-nilai tersebut..

B. Analisis Regresi

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data panel yaitu data *time series* yang diambil dari tahun 2019-2023. Untuk menentukan pengaruh variabel bebas terhadap kinerja APBD yang dinyatakan dalam rumus berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Kinerja APBD dalam (Rp)

α = Konstanta

i = Kabupaten Halsel

t = Waktu

β_1 - β_4 = Koefisien Regresi

X1 = Fungsi Alokasi (Rp)

X2 = Fungsi Distribusi (Rp)

X3 = Fungsi Stabilisasi (Rp)

e = error term

C. Uji Asumsi Klasik

C.1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut Gujarati dan Porter (2003) jika koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas.

Hipotesis yang digunakan dalam uji multikolinearitas yaitu:

H_0 = Tidak terdapat multikolinearitas

H_1 = Terdapat multikolinearitas

Melalui pengujian kriteria sebagai berikut:

Jika nilai koefisien korelasi $> 0,8$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat multikolinearitas. Jika nilai koefisien korelasi $< 0,8$ maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat multikolinearitas.

C.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Adanya sifat heteroskedastisitas ini dapat membuat penaksiran dalam model bersifat tidak efisien. Umumnya

masalah heteroskedastisitas lebih biasa terjadi pada data *cross section* dibandingkan dengan time series (Gujarati dan Porter, 2003). Jika t-statistik lebih besar daripada t-tabel dan signifikan terhadap $\alpha = 5\%$, maka terdapat heterokedastisitas. Namun, jika t-statistik lebih kecil daripada t-tabel dan tidak signifikan terhadap $\alpha = 5\%$, maka tidak ada heterokedastisitas.

C.3. Uji Hipotesis

C.3.1. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji parsial merupakan pengujian terhadap besarnya tingkat signifikansi setiap variabel dependen dalam persamaan. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan estimasi pada derajat keyakinan sebesar 95% atau $\alpha = 5\%$.

Pengambilan keputusan dalam Uji-t atau uji parsial ini akan dilakukan berdasarkan nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil pengolahan data. Nilai probabilitas tersebut yaitu apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sedangkan H_a (Hipotesis alternative) diterima. Apabila tingkat signifikansi $> 5\%$ maka H_0 diterima sedangkan H_a ditolak (Gujarati dan Porter, 2011).

C.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji-F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas dalam model secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Hipotesis pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

H0 diterima, jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ atau $F\text{ statistik} > 0,05$

H0 ditolak, jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ atau $F\text{ statistik} < 0,05$

Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka H0 ditolak, yang berarti variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, begitu pula sebaliknya. Cara lain adalah dengan melihat nilai probabilitas dimana jika probabilitas (*p-value*) < taraf nyata maka cukup bukti untuk menolak H0 sehingga variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya.

C.3.3. Koefisien Determinasi (*R-Squared*)

Koefisien determinasi digunakan untuk menginformasikan baik atau tidaknya (kebenaran) model regresi yang diestimasi atau digunakan dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dimana ukuran koefisiennya adalah 0-1. Jika *R-squared* mendekati 0 maka model regresi dikatakan kurang baik, karena pengaruh dari variabel independen akan semakin kecil terhadap variabel dependen.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Uji Regresi Statistik

Analisis dilakukan terhadap 4 variabel evaluasi penyusunan dan alokasi anggaran daerah yang meliputi, Fungsi Alokasi, Fungsi Distribusi, Fungsi Stabilisasi serta Kinerja APBD dalam rentang waktu 5 tahun (2019-2023)

sehingga keluarannya diharapkan bisa menjawab dengan ukuran-ukuran yang pasti. Selanjutnya di tampilkan tabel hasil analisis ekonometrik data panel yang dapat disajikan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Hasil Data Panel Fungsi Alokasi, Fungsi Distribusi, Fungsi Stabilisasi serta Kinerja APBD

Dependent Variable: KINERJA_APBD				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/20/24 Time: 10:54				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 3				
Total panel (balanced) observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.59E+11	7.24E+10	2.196190	0.0504
FUNGSI_ALOKASI	0.899773	0.346004	2.600471	0.0247
FUNGSI_DISTRIBUSI	3.040308	0.588942	5.162321	0.0003
FUNGSI_STABILISASI	0.083289	0.013620	6.115151	0.0001
R-squared	0.850695	Mean dependent var		5.67E+11
Adjusted R-squared	0.809976	S.D. dependent var		3.93E+11
S.E. of regression	1.71E+11	Akaike info criterion		54.79273
Sum squared resid	3.22E+23	Schwarz criterion		54.98154
Log likelihood	-406.9454	Hannan-Quinn criter.		54.79071
F-statistic	20.89157	Durbin-Watson stat		1.758358
Prob(F-statistic)	0.000076			

Sumber: Data diolah Peneliti Tahun 2024

Hasil analisis ditemukan nilai persamaan regresi masing-masing yang dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi konstanta positif. Nilai ($\alpha =$ konstanta) = 0,809976 dengan nilai signifikan prob 0,0247 < 0,05, menunjukkan bahwa model pengujian pertama terbukti Fungsi Alokasi (X_1) pemerintah terhadap kinerja APBD positif.

$$KINERJA_APBD = 159086810774 + 0.899773439575 * Fungsi_Alokasi + 3.04030795631 * Fungsi_Distribusi + 0.0832885132976 * Fungsi_Stabilisasi$$

i

Nilai koefisien regresi fungsi distribusi (X_2) konstanta positif, ($\alpha =$ konstanta) = 3,040307 dengan nilai signifikan prob 0,0003 < 0,05, menunjukkan

bahwa model pengujian variabel kedua (X_2) terhadap kinerja APBD positif. Selanjutnya nilai koefisien regresi fungsi stabilisasi (X_3) positif, ($\alpha =$ konstanta) = 0,083288 dengan nilai signifikan prob 0,0001 < 0,05, menunjukkan bahwa model pengujian variabel ketiga (X_3) terhadap kinerja APBD positif.

Secara keseluruhan, bahwa *Adjust R-Squared* sebesar 0.850695, yang mengkonfirmasi variabel independen dapat di jelaskan oleh variabel dependen. Selain itu nilai prob-F hitung pada seluruh model variabel menunjukkan angka 0.00076 yang kecil dari tingkat kesalahan $\alpha=0.05$, sehingga interpretasi dari seluruh variabel independen berpengaruh pada variabel dependen secara positif atau dengan kata lain model analisis dapat diterima.

B. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t-statistik menunjukkan pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain adalah konstan. Fungsi Alokasi, Fungsi Distribusi, Fungsi Stabilisasi serta Kinerja APBD, dengan menggunakan taraf keyakinan 95 persen.

Tabel 4.2 Hasil Uji T (Parsial)

Dependent Variable: KINERJA_APB				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/20/24 Time: 11:59				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 3				
Total panel (balanced) observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.59E+11	7.24E+10	2.196190	0.0504
FUNGSI_ALOKASI	0.899773	0.346004	2.600471	0.0247
FUNGSI_DISTRIBUSI	3.040308	0.588942	5.162321	0.0003
FUNGSI_STABILISASI	0.083289	0.013620	6.115151	0.0001
R-squared	0.850695	Mean dependent var		5.67E+11
Adjusted R-squared	0.809976	S.D. dependent var		3.93E+11
S.E. of regression	1.71E+11	Akaike info criterion		54.79273
Sum squared resid	3.22E+23	Schwarz criterion		54.98154
Log likelihood	-406.9454	Hannan-Quinn criter.		54.79071
F-statistic	20.89157	Durbin-Watson stat		1.758358
Prob(F-statistic)	0.000076			

Sumber: Data diolah Peneliti Tahun 2024

Nilai hasil uji t Fungsi Alokasi terhadap kinerja APBD sebesar 2,600471 dengan tingkat signifikan 0.024. Artinya jika Fungsi Alokasi yang ditujukan untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, naik 1%, maka kinerja APBD Kabupaten Halmahera Selatan selama 2019-2023 meningkat sebesar 26,00%.

Variabel Fungsi Dsitribusi, hasil uji t-statestiknya 5,162321 dengan tingkat signifikan 0.0003. Artinya jika fungsi distribusi anggaran yang terkait dimensi pemerataan, baik secara langsung maupun tidak langsung, naik 1% maka kinerja APBD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2019-2023 meningkat 51,62%. Fungsi Stabilisasi, diperoleh nilai t-statistik sebesar 6,115151 dengan tingkat signifikan 0.0001. Artinya jika fungsi stabilisasi anggaranya yang ditujukan sebagai alat pengendali inflasi dan pertumbuhan ekonomi naik 1%, maka kinerja APBD Kabupaten Halmahera Selatan meningkat 61,12%

C. Uji Simultan (Uji-f)

Hasil regresi Fungsi Alokasi, Fungsi Distribusi, Fungsi Stabilisasi terhadap kinerja APBD (*F-statistik*) sebesar 20,89157 dan nilai probabilitas *F-statistik* 0,000076.

Tabel 4.3

Hasil Uji F (Simultan)

Dependent Variable: KINERJA_APBD				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/20/24 Time: 11:59				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 3				
Total panel (balanced) observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.59E+11	7.24E+10	2.196190	0.0504
FUNGSI_ALOKASI	0.899773	0.346004	2.600471	0.0247
FUNGSI_DISTRIBUSI	3.040308	0.588942	5.162321	0.0003
FUNGSI_STABILISASI	0.083289	0.013620	6.115151	0.0001
R-squared	0.850695	Mean dependent var		5.67E+11
Adjusted R-squared	0.809976	S.D. dependent var		3.93E+11
S.E. of regression	1.71E+11	Akaike info criterion		54.79273
Sum squared resid	3.22E+23	Schwarz criterion		54.98154
Log likelihood	-406.9454	Hannan-Quinn criter.		54.79071
F-statistic	20.89157	Durbin-Watson stat		1.758358
Prob(F-statistic)	0.000076			

Sumber: Data diolah Peneliti Tahun 2024

D. Uji Determinasi ($Uji-R^2$)

Hasil uji yang tersaji dalam Tabel 4.4 nilai Adjusted *R-squared* sebesar 0,850695. Hal ini berarti bahwa, variabel independen dalam penelitian yaitu Fungsi Alokasi, Fungsi Distribusi, Fungsi Stabilisasi mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Kinerja APBD di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 85,06%, dan 14.94%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

E. .Pembahasan Hasil Penelitian

E.1. Hubungan Fungsi Alokasi dan Kinerja APBD

Kegiatan penyusunan anggaran yang seharusnya dilaksanakan pada bulan yang sudah di tentukan sering terjadi mundur sampai anakhir bulan, namun

demikian, proses penyusunan anggaran dan alokasi APBD TA 2023 bisa dimaklumi, karena terdapat kegiatan-kegiatan yang bukan kegiatan rutin pemerintah dalam evaluasi penyusunan anggaran di Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian yang dilakukan Herry Sutami, (2016), Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian penyusunan APBD dan Alokasi Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Singkawang berkisar sebesar 78,54% dengan interpretasi kriteria sangat baik. Penilaian tersebut terdiri dari 5 (lima) komponen penilaian yaitu Komponen Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan penilaian sebesar 70,10% dengan interpretasi baik dengan perlu sedikit perbaikan. Penelitian Nurseto, (2012), Variabel EDU/PDRB yaitu rasio anggaran pendidikan terhadap Produk Dometik Bruto mempunyai nilai koefisien 1,43 dengan nilai uji t sebesar 2,69665. Artinya positif dan signifikan, hal itu menunjukkan uji tanda yang tepat dan signifikan. Apabila anggaran pendidikan naik 1 persen maka kinerja pendidikan (APS) akan naik 1,43 persen. Angka ini termasuk cukup kecil sebagai upaya untuk mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah dipengaruhi oleh anggaran pendidikan pemerintah secara kecil. Hal tersebut karena meskipun anggaran pendidikan ditingkatkan namun biaya yang ditanggung oleh masyarakat masih tinggi.

E.2. Hubungan Fungsi Dsitribusi dan Kinerja APBD

Keterkaitan antara fungsi distribusi dengan kinerja APBD sangat erat di mana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan alokasi anggaran, namun lebih mengarah pada kualitas

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan pembangunan masyarakat. Penelitian Teuku Rully Hendrawan, (2018), menunjukkan bahwa perencanaan dan evaluasi anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja anggaran, terutama perencanaan keuangan, pengumpulan data yang paling akhir untuk evaluasi kinerja serta upaya mengatasi kendala pelaksanaan anggaran. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Solehudin, M. (2019).), terkait Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat, yang menemukan bahwa belanja modal tahun 2006 dan 2007 baik secara parsial maupun simultan tidak mempunyai pengasrapana anggaran SKPD signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Namun demikian apabila dilihat dari bentuk hubungannya masih menunjukkan arah yang positif yang dapat diartikan setiap peningkatan belanja modal menyebabkan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

E.3. Hubungan Fungsi Stabilisasi dan Kinerja APBD

Indikasi masalah dikarenakan belum ada petunjuk yang pasti untuk kebutuhan daerah yang dapat mengevaluasi secara rutin penyusunan anggaran setiap tahunnya, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja daerah yang mengakibatkan belanja operasional daerah untuk pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan cukup kecil atau belum terpenuhi secara maksimal.

Penelitian Budi Yanti, (2018), hasil penelitian nilai t-hitung untuk variabel anggaran belanja adalah 6.696 dengan linear berganda. Berdasarkan analisis

regresi linear berganda dengan menggunakan variabel anggaran belanja berpengaruh signifikan terhadap evaluasi anggaran kecil dari 0,05 dengan ttabel sebesar 2.920. Dengan demikian thitung probabilitas signifikansi sebesar 0.007. Probabilitas signifikansi tersebut lebih > t-tabel maka, belanja pada Balai Taman Nasional Siberut, maka hipotesis (H1) dapat diterima. demikian thitung signifikansi sebesar 0.090 lebih kecil dari 0,05 dengan ttabel sebesar 2.920. Berdasarkan uji R2 (Adjusted R-Square) sebesar Siberut adalah sebesar 91,87%.

Atika, (2019) menjelaskan bahwa proses penyusunan perencanaan anggaran pada Dinas Kesehatan dimulai dari usulan Puskesmas yang dipadukan dengan hasil MP-3 kemudian disatukan dengan usulan berbagai Seksi dan Sub Bagian untuk diajukan pada MP-3 Tingkat Kabupaten. Tujuan sasaran program kesehatan mengacu pada Draft Renstra yang memuat Visi, Misi, tujuan dan sasaran program kesehatan yang ada pada 11 paket kebijakan dan menjadi barometer pembangunan kesehatan. Sejalan dengan (Zulkarnain, 2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hasil pengukuran Rasio Desentralisasi Fiskal menyimpulkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih tergolong “Kurang”. Sartika & Pratama, (2019). Memnemukan kinerja keuangan Kepulauan Meranti Pemerintah Kabupaten yang diukur dengan rasio menunjukkan efisiensi keuangan daerah efisien dengan rasio rata-rata 72,84%. Kemudian bila diukur dengan rasio daerah kemandirian finansial menunjukkan sangat rendah dengan rasio rata-rata 3,45%. Selanjutnya jika diukur dengan rasio efektivitas PAD (PAD) menunjukkan efektivitas dengan rasio rata-rata 103,65%. Saat diamati oleh rasio derajat desentralisasi menunjukkan rasio rata-rata 3,31%. Terakhir, diukur dari rasio ekuivalen, khususnya rasio

pengeluaran operasional menunjukkan rasio rata-rata 74,14% dan belanja modal 21,80%.

Fitrianingrum, (2017) menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bantul dilihat dari (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diantara 25-50% masih tergolong Rendah dan dalam kategori pola hubungan konsultatif (2) Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Efektif (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong kurang efisien (4) Rasio Keserasian/Belanja Modal dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan lebih dominan dialokasikan pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal (5) Rasio pertumbuhan pendapatan daerah yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Bantul untuk tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan.

V. Kesimpulan

Merujuk pada temuan dan pembahasan di bab sebelumnya maka kesimpunnya :

1. Fungsi alokasi terbukti memiliki hubungan yang positif dengan kinerja APBD di Kabupaten Halmahera Selatan. Artinya sesuai fungsi alokasi yang bertujuan mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, melalui fungsi alokasi APBD mempertegas peran pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan berjalan dengan baik.
2. Fungsi distribusi terbukti memiliki hubungan yang positif dengan kinerja APBD di Kabupaten Halmahera Selatan. Artinya melalui fungsi distribusi, mempunyai dimensi pemerataan, baik secara langsung maupun tidak langsung terbukti memberikan manfaat kepada semua pihak.
3. Fungsi Stabilisasi terbukti memiliki hubungan yang positif dengan kinerja APBD di Kabupaten Halmahera Selatan. Stabilisasi dasarnya menyangkut dua hal, yaitu alat pengendali inflasi dan penstabil pertumbuhan ekonomi, dan terbukti berjalan dengan sangat baik.
4. Kedepan yang perlu mendapat perhatian terkait fungsi alokasi adalah memastikan harus konsisten dengan perencanaan penganggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

5. Fungsi stabilisasi lebih ditujukan pada kelompok masyarakat yang masih tertinggal dan belum secara maksimal terlayani dengan baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonominya.
6. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk kedepannya memastikan anggaran pengendalian inflasi harus tersedia dalam APBD tahun berjalan, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus meningkatkan kordinasi, serta memastikan tersedianya transportasi dalam memudahkan mobilisasi orang, barang maupun jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Atika, A. (2019). *Evaluasi Penyusunan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan*. 160–178.
- Bastian, I. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta.
- Budi Yanti. (2018). analisis pengaruh anggaran belanja dan realisasi anggaran terhadap evaluasi anggaran belanja di balai taman nasional siberuT. 2, 112–115.
- Chelsea Pangalila (2017). *Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Keuangan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*.
- Elsera (2022). *Identifikasi Faktor Keterlambatan Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Riau*.
- Fitrianingrum, D. (2017). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten Bantul Tahun 2014-2016*. 1–66.
- Halim, A. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hansen (2012). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hendrawan (2019). *Analisis Perencanaan dan Evaluasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil*.
- Herry Sutami. (2016). *evaluasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan alokasi anggaran belanja daerah: studi kasus pada pemerintah kota singkawanG. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 1–23.
- Mardiasmo (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Muliyadi. (2015). *Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penerapan Anggaran Kinerja, pada Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur, Magister Administrasi Publik - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Kutai*.
- Salbiah dan Ridha Rizky (2012). *Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*.
- Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 - 2016. Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 179–188. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.6494>
- Solehudin, M. (2019). *Serapan Anggaran SKPD Pemkot Bandung Rendah, Ada yang Baru 27 Persen. News.Detik.Com*.

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d4771587/serapan-anggaran-skpd-pemkot-bandung-rendah-ada-yang-baru-27-persen>

- Teuku Rully Hendrawan. (2018). Analisis Perencanaan dan Evaluasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil. *Pemutusan Hubungan Kerja, 1*, 1–12.
- Welhelmina (2012). Evaluasi proses penyusunan dan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Pemerintah daerah Kabupaten Kupang.
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala, 3*(1), 61–74.